



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024
KE KOTA SURAKARTA JAWA TENGAH
TANGGAL 4 S.D. 8 OKTOBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan. Berdasarkan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah, dan Kota Malang Jawa Timur.

A. Dasar Hukum

- 1) Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- 2) Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- 4) Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.
- 5) Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah, dan Kota Malang Jawa Timur.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapat penjelasan dari pejabat daerah dan masyarakat mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi, serta mendapatkan masukan mengenai berbagai persoalan pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih dengan didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim juga didampingi oleh pejabat dari para mitra kerja Komisi X DPR RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ir. Ahyani, M.A. yang dihadiri oleh:
 - 1) Muspida dan Forkopimda Kota Surakarta.
 - 2) Ketua lembaga/badan penjamin mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Kepala dinas pendidikan, dewan pendidikan, PGRI, tokoh-tokoh pendidikan, dan para pakar pendidikan Kota Surakarta.
 - 4) Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, PHRI (perhimpunan hotel dan restoran indonesia), ASITA (asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia), dan pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Surakarta.
 - 5) Kepala dinas pemuda dan olahraga, KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda gerakan pramuka di Surakarta.
 - 6) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Surakarta dan aktivis perpustakaan di Kota Surakarta.
 - 7) Ketua lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Pimpinan PTN dan PTS.
 - a) Universitas Sebelas Maret
 - b) Universitas Terbuka Surakarta
 - c) Politeknik Pariwisata Sragen
 - d) Institut Seni Indonesia Surakarta
 - e) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
 - f) Universitas Sahid Surakarta (UNSAHID)
 - g) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI)
2. Melakukan kunjungan lapangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan bidang pendidikan, didampingi oleh walikota Surakarta Gibran Rakabuming.
 - 1) Sentra Kota Batik di Desa Kahuman, Pasar Kliwon, Surakarta.
 - 2) SMP Negeri 1 Surakarta.
 - 3) SMA Negeri 4 Surakarta.
 - 4) SMK Negeri 2 Surakarta.

II. TEMUAN DATA

Data tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan pemangku kepentingan lain dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi X DPR RI sebagai berikut.

A. Bidang Pendidikan

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Program Indonesia Pintar (PIP) perlu pembaharuan data secara periodik dan penambahan kuota. Selama ini dinas pendidikan mendapat banyak komplain terkait warga miskin yang tidak mendapat PIP atau warga miskin yang sebelumnya menerima PIP tetapi tidak menerima lagi pada periode berikutnya.
 - b. Bantuan operasional sekolah (BOS) ada keterlambatan di beberapa sekolah, sementara serapan anggaran menjadi komponen dalam

- penghitungan TPP yang di evaluasi tiap triwulan sehingga menghambat kinerja keuangan dinas secara keseluruhan.
- c. Kurikulum merdeka, dalam pelaksanaannya tidak semua guru siap melakukan perubahan kurikulum, diantaranya karena harus mempelajari aplikasi baru sementara guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran kreatif yang mengakomodir potensi siswa yang berbeda-beda.
 - d. Assessment nasional (AN), pada implementasinya masih terdapat hambatan. Masih ditemukan kendala teknis yang dialami sekolah pada pelaksanaan AN, rapor pendidikan yang menjadi potret kinerja dinas dan satuan pendidikan rilisnya terlambat, serta data yang tidak *match* antara data di Surakarta dan yang menjadi capaian di rapor pendidikan.
2. Formasi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Surakarta untuk jabatan fungsional guru yang dibutuhkan dan ditetapkan pada tahun anggaran 2023 sebanyak 505 formasi dan 6 formasi, diantaranya adalah formasi penyandang disabilitas. Sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023 dilaksanakan dengan 2 jenis penetapan kebutuhan, antara lain:
- a) Kebutuhan khusus, terdiri dari 3 kriteria pelamar, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Pelamar prioritas peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
 - 2) Eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - 3) Guru non aparatur sipil negara (Non ASN) di sekolah negeri guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
 - b) Kebutuhan umum, terdiri dari 2 kriteria pelamar, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sampai 2 Oktober 2023 proses seleksi masih berjalan. Jumlah pelamar kebutuhan khusus sampai dengan saat ini tercatat 380 orang terdiri atas P1, THK II, dan non ASN sekolah negeri. Ada beberapa persoalan yang muncul dalam proses pendaftaran, antara lain:

- a. Terdapat pelamar yang secara dapodik belum memenuhi syarat untuk masuk kategori kebutuhan khusus karena masa kerja kurang dari tiga tahun tetapi ketika mendaftar pada kebutuhan khusus bisa mendaftar sampai selesai. Padahal penetapan masa kerja dilakukan secara otomatis by system dari dapodik dalam sscasn.

- b. Terdapat beberapa dokumen yang diunggah tidak valid dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Hal ini dimungkinkan bisa dilengkapi atau diperbaiki pada masa sanggah.
3. Pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dengan program turunannya sudah diimplementasikan di Kota Surakarta. Jumlah sekolah penggerak di Kota Surakarta terdiri atas 49 sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP yang terdiri atas angkatan I sampai dengan III total guru penggerak adalah 294 guru pada jenjang PAUD, SD dan SMP, terdiri atas 131 guru yang telah selesai mengikuti pembelajaran dan lulus guru penggerak pada angkatan 4 dan 7 dan 163 guru yang saat ini masih mengikuti pembelajaran pada angkatan 8 dan 9. Di Surakarta, telah melantik 6 kepala sekolah dari guru penggerak, sementara belum ada guru penggerak yang dilantik menjadi pengawas sekolah.

B. Pendidikan Tinggi

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta menyampaikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) sejalan dengan pembangunan jangka panjang SDM di Surakarta yang dijabarkan dalam visi Kota Surakarta pada RPJMD TAHUN 2021–2026. Korelasi kebijakan MBKM dapat mendukung pembangunan jangka panjang SDM di Kota Surakarta dijabarkan dalam misi Kota Surakarta yang tertuang pada RPJMD TAHUN 2021–2026.
2. Implementasi kebijakan MBKM, ISI Surakarta melakukan perencanaan dan sinkronisasi dalam beberapa tahap, yaitu: analisis kebutuhan, pengembangan strategi, implementasi. Bentuk perencanaan dan sinkronisasi implementasi MBKM adalah: penyesuaian kurikulum pembelajaran, kerjasama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kapasitas SDM. ISI Surakarta melakukan akreditasi 15 program studi baik dari sarjana, magister, maupun program doktor, begitupula untuk akreditasi perguruan tinggi juga sudah terakreditasi.
3. Tahun Akademik 2023/2024 ISI Surakarta mendapat kuota KIP-K sebanyak 200 mahasiswa, terdistribusi skema 1 (penuh) sebanyak 110 mahasiswa, skema 2 (biaya pendidikan) sebanyak 90 mahasiswa, kemudian terdapat KIP-K usulan masyarakat skema penuh sebanyak 2 mahasiswa.
4. Untuk PPDB/PMB sarjana dan sarjana terapan tahun akademik 2023/2024 ISI Surakarta menetapkan daya tampung sebanyak 1.110 mahasiswa baru. Melalui 3 jalur penerimaan dengan rincian sebagai berikut.
 - SNBP daya tampung sebanyak 222 mahasiswa, jumlah pendaftar 859 peserta, dinyatakan lolos 210 mahasiswa, dan registrasi sebanyak 202 mahasiswa;
 - SNBP daya tampung sebanyak 558 mahasiswa, jumlah pendaftar 1.542 peserta, dinyatakan lolos 451 mahasiswa, dan registrasi sebanyak 414 mahasiswa;
 - Mandiri daya tampung sebanyak 330 mahasiswa, jumlah pendaftar 621 peserta, dinyatakan lolos 370 mahasiswa, dan registrasi sebanyak 216 mahasiswa.
 - Total penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024 sebanyak 832 mahasiswa.

5. Untuk mendukung ke akreditasi internasional masih dibutuhkan sarana dan prasana yang lebih lengkap terutama difabel karena alokasi untuk akses difabel belum mencukupi. Gedung perkantoran dalam rangka pengembangan institusi masih kurang mengingat tidak ada alokasi dari anggaran dengan jumlah yang cukup besar. Kebutuhan sarana pembelajaran terbentur dengan peraturan TKDN yang sangat ketat sehingga kesulitan memenuhi sarana yang standar internasional terutama alat-alat di laboratorium.

Universitas Sahid Surakarta menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dukungan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Surakarta secara tidak langsung sudah ada. Ada beberapa usulan agar keterlibatan pemerintah daerah lebih optimal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama dengan keberadaan PTS-PTS yang sedang bertumbuh:
 - PT perlu terlibat dalam meningkatkan kompetensi ASN, terutama terkait dengan peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi SDM ASN, seperti penyediaan beasiswa studi lanjut secara rutin/kontinu bagi ASN dan melibatkan PT (khususnya PTS) dalam daerah tersebut sebagai tempat studi lanjut bagi para ASN.
 - mengagendakan sosialisasi program kerja tahunan dari pemerintah daerah (khususnya terkait dengan pendidikan/penelitian/pengabdian) kepada seluruh PT di daerah.
 - Sosialisasi peluang dana hibah/bantuan dari Pemda untuk PT (khususnya PTS berkembang). Informasi tentang ada tidaknya dana hibah/bantuan Pemda belum banyak diketahui oleh PTS. Hibah untuk PT selama ini baru berasal dari Kemendikbudristek. Perlu peluang adanya dana hibah/bantuan Pemda dalam skema Tridharma PT atau pengembangan sarana prasarana.
2. Evaluasi mengenai program dan kegiatan, antara lain terkait dengan KIP kuliah. Pada tahun 2023 kuota KIP kuliah dari LLDIKTI 6 sangat turun drastis. USAHID Surakarta hanya mendapat 3 kuota dari LLDIKTI 6, sedangkan tahun sebelumnya mendapat 32 kuota. Perlu ada sosialisasi terkait mekanisme resmi untuk pengajuan KIP usulan masyarakat ini. Perlu ada kejelasan mengenai kuota usulan serta sosialisasi mengenai penentuan tersebut.
3. Terkait kebijakan MBKM, tahun ini ada sekitar 120-an mahasiswa yang mengambil MBKM dengan berbagai pilihan kegiatan baik dengan dukungan hibah MBKM ataupun pendanaan mandiri dari PT. Akan tetapi ada tantangan bagi PTS dalam pembiayaan kegiatan MBKM secara mandiri. Terutama bagi PTS yang masih kecil, kendala pembiayaan kegiatan MBKM membuat kuota peserta juga tidak bisa semaksimal mungkin. Diusulkan bahwa adanya dana bantuan penyelenggaraan MBKM secara rutin per tahun yang dapat membantu PTS agar MBKM tetap berjalan secara maksimal.
4. Universitas Sahid Surakarta sudah memiliki kurikulum yang mendukung kebijakan MBKM. Kampus juga sudah menyelenggarakan kegiatan MBKM. Selain itu beberapa pedoman/kebijakan terkait dengan pelaksanaan MBKM juga sudah ada dan sudah diimplementasikan. Tantangan yang masih dihadapi kampus adalah *follow up* kerja sama dengan DUDI yang tidak

hanya pada tahap riset saja tetapi harus mampu sampai tahap menghasilkan produk layak jual.

LLDIKTI Wilayah VI menyampaikan, antara lain bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam lingkup kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi.

1. Minat badan penyelenggara perguruan tinggi untuk melakukan penggabungan/penyatuan masih rendah. Solusi: pendampingan, sosialisasi arah kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dengan jalur akselerasi penyatuan/penggabungan yang merupakan Renstra Kemendikbudristek 2020—2024.
2. Kesiapan tata kelola dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang tidak terakreditasi masih perlu pembinaan lebih lanjut. Solusi: fasilitasi percepatan mutu perguruan tinggi penyesuaian instrument, dan menjalankan amanah Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 melalui klinik akreditasi, asistensi, bimbingan teknis dalam kemasan PINARAK (pojok inklusi bicara akreditasi) dan PAKARTI (pendampingan kinerja perguruan tinggi).

C. Bidang Kebudayaan

1. Salah satu upaya dan program Pemerintah Kota Surakarta dalam memajukan kebudayaan di Kota Surakarta adalah dengan melalui regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, dimana pemajuan warisan budaya tak benda merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan.
2. Pencatatan dan pendokumentasian obyek pemajuan kebudayaan selama ini dilakukan melalui proses pencatatan dan pendokumentasian warisan budaya tak benda (WBTB) yang terdapat di Kota Surakarta. Kendala yang sering dihadapi adalah sulitnya mendapatkan data pendukung bagi sebagian OPK tertentu yang akan diajukan, seperti sudah tidak adanya narasumber, kurangnya data otentik terkait sejarah baik berupa tulisan maupun foto-foto, dan sebagainya. Selain hal tersebut juga karena masih kurangnya daya dukung berupa penganggaran untuk kegiatan pencatatan dan pendokumentasian OPK di daerah.
3. Kendala yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah masalah-masalah yang belum selesai terkait dengan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

D. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Dukungan pemerintah daerah terhadap target-target yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2023 adalah mengupayakan peningkatan kunjungan dan pergerakan wisatawan ke Kota Surakarta dengan cara antara lain sebagai berikut.
 - a. Penambahan daya tarik dan destinasi wisata.
 - b. Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed.
 - c. Revitalisasi koridor Ngarsapura dan Gatot Subroto.
 - d. Revitalisasi Taman Balekambang.
 - e. Pembangunan Museum of Culture and Technology.

- f. Revitalisasi Kebun Binatang Jurug (Solo Safari).
 - g. Revitalisasi Lokananta.
 - h. Revitalisasi Pura Mangkunegaran (Pracima Tuin).
 - i. Revitalisasi Kraton Kasunanan Surakarta.
 - j. Atraksi Budaya Prajurit Kraton Surakarta.
2. Dukungan terhadap pemulihan pariwisata pada 2023 yang terdampak pandemi Covid 19.
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi pekerja Parekraf pada tahun 2020.
 - b. Pemberian bantuan peralatan bagi komunitas ekonomi kreatif tahun 2021.
 - c. Pemberian bantuan sosial bagi pegawai hotel pada tahun 2021.
 - d. Sejak tahun 2022 s.d. 2023 sudah dilaksanakan kembali beberapa kegiatan yang melibatkan pelaku pariwisata dan komunitas ekonomi kreatif.
 3. Pemerintah Kota Surakarta mengharapkan fasilitasi profesi dan sertifikasi usaha serta pengendalian harga tiket pesawat dalam negeri.

E. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

1. Terdapat sejumlah permasalahan terkait kepemudaan di antaranya:
 - Penumbuhan wirausaha pemula di Kota Surakarta masih belum terintegrasi dengan OPD dan Instansi yang lain karena penyelenggaraan pelatihan pesertanya berbeda-beda sehingga tidak ada keberlanjutan. Perlu dibentuknya Tim Terpadu Penumbuhan Wirausaha Pemula di Kota Surakarta untuk mengintegrasikan pelaksanaan pelatihan dengan tujuan mencetak wirausaha baru mulai dari nol sampai dengan siap memulai usaha baru
 - Kurangnya dukungan kepada wirausaha pemula dalam mengembangkan usahanya baik yang baru merintis usaha maupun yang sudah berjalan;
 - Belum tersedianya prasarana dan sarana kepramukaan (Bumi Perkemahan) yang memadai untuk mendukung kegiatan kepramukaan di Kota Surakarta. Saat ini sudah dianggarkan pembangunan Bumi Perkemahan (lahan parkir) tetapi belum untuk fasilitas lainnya (Kantor, Aula dan Fasilitas MCK) sehingga perlu diberikan tambahan anggaran yang lebih agar Bumi Perkemahan bisa terbangun dengan baik dan representatif.
2. Permasalahan kepemudaan di Kota Surakarta menurut KNPI adalah (1) minimnya fasilitas penunjang pengembangan pemuda. Gelanggang Pemuda Soekarno masih didominasi fasilitas olahraga dalam pemanfaatannya. (2) Perlu dibangun beragam fasilitas yang ramah pengembangan pemuda kota, walaupun di luar kewenangan OPD Dispora. Dispora diharapkan menjadi Hub/penghubung pemanfaatan fasilitas ke instansi terkait dengan harga spesial atau bebas biaya jika memungkinkan. (3) Minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan Dispora, sehingga perlu kegiatan khusus seperti sarasehan pemuda untuk menyerap dan menakar potensi muda kota. (4) Kota Surakarta belum memiliki Perda Kepemudaan, baru ada peraturan walikota.

F. Bidang Perpustakaan

1. Evaluasi atas kinerja perpustakaan adalah terkait: (1) alokasi anggaran; (2) kendala dalam mengubah mindset, bahwa perpustakaan perlu bertransformasi secara inklusif, (3) digitalisasi layanan perpustakaan

- berbasis web. Pemerintah Kota Surakarta menuju rintisan Solo Digital Library (Solo DigiLib); (4) Memasukkan issue literasi dalam dokumen RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD, bahwa IPLM dan TGM yang rendah berdampak terhadap rendahnya daya saing SDM/human capital dalam memenangkan persaingan global.
2. Kesejahteraan pustakawan diharapkan dapat dipenuhi melalui rekrutmen kebutuhan pustakawan dalam rangka penguatan lembaga literasi di daerah melalui tenaga P3K, yang bersumber dari APBN.
 3. Permasalahan dalam layanan perpustakaan antara lain: pengadaan bahan koleksi; aksesibilitas user luar kota yang belum diberi kesempatan meminjam buku di perpustakaan; aplikasi perpustakaan yang belum terseragamkan (Kota Surakarta berencana migrasi dari SLIM ke InLisLite).
 4. Pemerintah Daerah Surakarta mengusulkan hal berikut untuk kemajuan perpustakaan digital melalui (1) dukungan pengadaan sarpras digital; (2) menuju layanan perpustakaan berbasis web; (3) Perlu sinkronisasi dengan industri penerbitan buku; (4) Penguatan jaringan internet kota yang makin optimal.

G. Diskusi dan Pembahasan

Pada acara diskusi dengan para pemangku kepentingan di Kota Surakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Surakarta **Dr. Ahyani, MA.** terdapat beberapa catatan penting, diantaranya sebagai berikut.

1. Ichsan dari Paguyuban Wisata Batik Kauman (PWBK) dan Jamaah Masjid Agung Surakarta menyampaikan:
 - terdapat ide mengenai pengembangan destinasi wisata Masjid Agung Kraton Surakarta karena masjid memiliki budaya dan kearifan lokal.
 - perlu museum untuk mengamankan manuskrip kuno karena beberapa waktu lalu ada manuskrip yang dimakan rayap, juga perlu museum pendidikan;
 - perlu penguatan kembali Solo sebagai *spirit of Java*.
2. Universitas Sahid Surakarta menyampaikan bahwa KIP Kuliah di PTS sangat dibutuhkan. Tahun ini ada penurunan yang cukup banyak, sampai 50%. Tahun lalu 32 KIP dan sekarang hanya 3 KIP. Di sisi lain, ada jalur usulan masyarakat, banyak PTS yang belum paham mengenai bagaimana pengajuan dan kuotanya. Usul agar KIP Kuliah di PTS kecil dan baru berkembang perlu ditambah dan sosialisasi mengenai KIP jalur usulan masyarakat.
3. Asrori, KONI Kota Surakarta, menyampaikan bahwa Surakarta memiliki sejarah sebagai daerah tempat diselenggarakannya PON pertama. Sejarah ini relevan untuk pendirian museum olahraga di Surakarta. Sedangkan Ir. Ahyani, Sekda Kota Surakarta, menambahkan bahwa pemerintah daerah berencana mendirikan sekolah khusus olahraga (SKO) dan sudah diupayakan selama empat tahun, tetapi kewenangan hanya sampai tingkat SMP. Pemda berharap dapat berdiri SKO tingkat SMA, Komisi X DPR RI diharapkan dapat menjembatani hal tersebut sehingga Kota Surakarta bisa mandiri dalam mempersiapkan atlet-atlet dan bisa melayani atlet/pelajar dari luar kota. Pemprov belum memiliki perhatian mengenai hal tersebut. Selain itu, Pemda juga membutuhkan bantuan GOR indoor yang biayanya mencapai Rp20 miliar.

4. Sandro, pegiat film Surakarta mengemukakan bahwa *subsector* film sangat tidak diperhatikan, padahal potensi pembuat film di Surakarta sangat besar. Komunitas film mengharapkan anggaran tersendiri bagi pengembangan *subsector* ini di Kota Surakarta dan bercita-cita menyelenggarakan festival film di Surakarta.
5. Wahyono, PGRI Surakarta menyampaikan bahwa saat ini PGRI Surakarta menggunakan gedung yang dimiliki pengurus besar PGRI karena tidak memiliki gedung. Terdapat gedung cagar budaya yang seharusnya bisa direhab, tetapi belum ada solusi.
6. Edo Johan, KNPI Surakarta mengemukakan bahwa olahraga di Surakarta cukup maju, terlihat dari banyak atlet dan fasilitas olahraga yang dibangun. Tetapi fasilitas tersebut tidak dapat diakses oleh semua pihak karena ada tarif harga yang ditentukan. Tidak semua dapat menjangkau tarif tersebut. Selain itu, terdapat gedung teater di Surakarta tetapi di bawah pemerintah provinsi, sementara pemkot tidak memiliki fasilitas tersebut, padahal banyak komunitas teater di Kota Surakarta.
7. Dr. Wardani Sugiyanto, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, merespon bahwa kurikulum merdeka memungkinkan peningkatan olahraga melalui jam pilihan sebanyak 280 jam di SMA/K dan di perguruan tinggi dengan tiga semester kuliah lapangan. Pilihan dapat difokuskan untuk olahraga tertentu dan SMA/K tertentu, termasuk fasilitas yang dapat digunakan. Hal ini sudah terlaksana di beberapa tempat. Adapun untuk pendirian SKO akan kami komunikasikan, karena menggunakan mekanisme DAK.
8. Drs. Vinsensius Jemadu, Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, dan Iman Santosa, Direktur Aplikasi, Permainan, TV dan Radio, Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan bahwa sudah terdapat e-book wilayah jelajah masjid. Ada 850.000 masjid dan ada ribuan yang punya nilai sejarah, religi dan layak jadi destinasi wisata. Sudah *launching* dan bisa jadi persinggahan di masa mudik. Direktorat Aplikasi, Film dan Radio memiliki program master class untuk skenario series. Tahun ini diselenggarakan di Pekanbaru, Malang, dan Balikpapan. Program tahun ini fokus agar menghasilkan produk yang bisa tayang di platform seperti vidio, dan lain-lain. Ada 45 (empat puluh lima) penulis terbaik yang diinkubasi dan tayang di *Vision+*. Tahun depan *masterclass* direncanakan di kota-kota lain, mudah-mudahan bisa diselenggarakan di Surakarta dan melibatkan badan perfilman Indonesia.
9. Andi Susanto, Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora RI, mengapresiasi usulan mengenai museum olahraga, terlebih banyak even besar dilaksanakan di Surakarta. Pembicaraan mengenai museum ini perlu pembicaraan secara menyeluruh. Usulan tersebut akan dikomunikasikan di internal Kemenpora RI untuk menyikapinya dan diharapkan bisa menjadi perbaikan museum olahraga.
10. Dr. Joko Santoso, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpunas RI, mengemukakan bahwa sudah pernah melakukan perbaikan atau konservasi koleksi naskah di Masjid Agung Surakarta, serta memberikan rekomendasi mengenai pola pengelolaan koleksi tersebut.

H. Kunjungan ke Kampung Batik Kauman Surakarta, SMPN 1 Surakarta, SMAN 4 Surakarta dan SMKN 2 Surakarta. Tim kunker mengunjungi Kampung Batik

Kauman Surakarta, melihat proses pembuatan batik dan berharap batik bisa terus dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa. Tim juga mengunjungi tiga sekolah, yakni SMPN 1 Surakarta, SMAN 4 Surakarta dan SMKN 2 Surakarta didampingi oleh Walikota Solo. Kunjungan dimaksudkan untuk belanja masalah, di antaranya mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Surakarta.

III. KESIMPULAN

A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Terdapat beberapa persoalan pada bidang ini yakni (1) perlunya pembaharuan data secara periodik dan penambahan kuota PIP; (2) keterlambatan salur BOS di beberapa sekolah yang berakibat terhambatnya kinerja dinas secara keseluruhan; (3) tidak semua guru siap dengan perubahan kurikulum juga aplikasi baru dan tuntutan pembelajaran kreatif; (4) kendala teknis yang dialami sekolah pada pelaksanaan AN, data yang tidak *match* antara data di Surakarta dan capaian rapor pendidikan.

B. Bidang Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi di Kota Surakarta menyambut baik kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, tetapi mereka mengalami tantangan mengenai pembiayaan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (khususnya pada PTS kecil), ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, kemampuan perguruan tinggi untuk mengembangkan pembelajaran inovatif dan kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan. Masalah lain pada bidang ini adalah mengenai kuota KIP kuliah yang minim, padahal sangat dibutuhkan oleh PTS kecil.

C. Bidang Kebudayaan

Kendala dalam menetapkan warisan budaya tak benda adalah sulitnya mendapat data pendukung bagi sebagian OPK yang akan diajukan, seperti tidak ada narasumber, kurangnya data otentik terkait sejarah, kurangnya penganggaran untuk kegiatan pencatatan dan pendokumentasian OPK, minimnya peran serta masyarakat.

D. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Surakarta mengharapkan fasilitasi profesi dan sertifikasi usaha serta pengendalian harga tiket pesawat dalam negeri.

E. Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

Terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan di Kota Surakarta di antaranya pengelolaan dan penumbuhan wirausaha pemula yang belum terintegrasi dengan OPD dan instansi terkait, kurangnya dukungan pengembangan tersebut, prasarana dan sarana yang belum memadai bagi pengembangan pemuda, partisipasi pemuda yang masih minim, belum ada perda kepemudaan.

F. Bidang Perpustakaan

Beberapa catatan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Surakarta adalah (1) alokasi anggaran yang masih perlu ditingkatkan; (2) kendala dalam mengubah *mindset* dan perlunya menumbuhkan inovasi layanan; (3) pengadaan koleksi yang terbatas sesuai kemampuan keuangan; (4) isu literasi perlu dimasukkan dalam RPJP, RPJM dan RKPD; dan (5) pemenuhan kesejahteraan pustakawan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan data, hasil kunjungan kerja, dan kesimpulan yang diperoleh tersebut, Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut.

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi

1. Mendesak Kemendikbudristek RI bersama pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surakarta, untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan melakukan terobosan dalam penyelesaian persoalan seperti penyaluran BOS, pelaksanaan asesmen nasional, dan sinkronisasi data.
2. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan dukungan bagi PTN maupun PTS dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, diantaranya dalam hal infrastruktur dan pengembangan SDM.
3. mendesak Kemendikbudristek RI untuk memperhatikan jumlah dan kuota KIP kuliah bagi PTS, khususnya PTS di Kota Surakarta yang mengalami penurunan.

B. Bidang Kebudayaan

Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pembuatan skema pemeliharaan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemajuan kebudayaan.

C. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam program fasilitasi profesi dan sertifikasi usaha untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. Bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan

Mendorong Pemerintah untuk mendukung pembangunan fasilitas *youth centre* dan bumi perkemahan Kota Surakarta guna menunjang pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.

E. Bidang Perpustakaan dan Literasi

Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan pemerataan dan pemenuhan layanan perpustakaan dengan mengatasi kendala fasilitas/sarana teknologi informasi digital, bahan dan koleksi perpustakaan, serta kesejahteraan tenaga perpustakaan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 31 Oktober 2023

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A 444**